PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI 14 KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

GREGORIUS JONI KURNIAWAN
NIM. B1011201044

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 766840, Surel feb@untan.ac.id, Laman https://feb.untan.a.c.id/

SURAT KETERANGAN
Nomor: 12082/09.24/PlagiasiEP

Menjelaskan bahwa mahasiswa berikut:

Nama	Gregorius Joni Kurniawan
NIM	B1011201044
Prodi	Ekonomi Pembangunan
Program	Reguler / ~~PPAPK*~~
Judul Skripsi/Tugas Akhir	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Setelah dilakukan pemeriksaan, naskah tugas akhir mahasiswa tersebut dinyatakan telah **MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~** syarat ketentuan pemeriksaan plagiasi.
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 12 Desember 2024
Ketua TIM Pemeriksa Plagiasi
Jurusan IESP

Romi Suradi, S.E., M.E.
NIP.198610022019031004

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Gregorius Joni Kurniawan
NIM	: B1011201044
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal/TA	: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 7 Maret 2025

Gregorius Joni Kurniawan
NIM.B1011201044

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Gregorius Joni Kurniawan
NIM	: B1011201044
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 7 Maret 2025

Gregorius Joni Kurniawan
B1011201044

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Gregorius Joni Kurniawan
B1011201044

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 8 Januari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc.	06 maret 2025	
		NIP 197602082005012002		
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A.	05 maret 2025	
		NIP 196707071992021001		
3.	Anggota Penguji	Dr. H. Wahyudi, S.E.,M.Si	04 maret 2025	
		NIP 196312091989031004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 11 MAR 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP.197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	:	Gregorius Joni Kurniawan
NIM	:	B1011201044
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. Sri Kurniawati, S.E.,M.Sc. NIP. 197602082005012002	3/12-2024	

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, pertolongan dan kekuatan atas penulisan Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyapampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M,Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E.,M.Sc. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E.,M.Sc. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelsaikan tugas akhir dengan baik dan benar.
5. Bapak Prof. H. Eddy Suratman, S.,M.A. Selaku ketua penguji yang telah yang telah memberikan saran, kritik, dan arahan dalam penulisan tuugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Bapal Dr. H. Wahyudi, S.E.,M.Si. Selaku anggota penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak atas ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, Tata Usaha, Staf Kebersihan dan Staf Keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
9. Keluarga Penulis Terutama Alm. Ibu Elisabet Katen tersayang dan Bapak Suardi tercinta serta Kakak Gusniar Purwanti, S.Hut, Gege Kevin, Kakak Apriana Anania, S.Si., Abang Juliansyah, S.E dan Alm. Kakek Silvanus Jaam yang penulis cintai dan banggakan terimakasih telah menjadi penyemangat di waktu penulis mengalami kesusahan, serta menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan penulis.
10. Pengurus GAMEKA periode 2022/2023 yang telah memberikan penggalaman yang luar biasa bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Teman-teman GAMEKA 20 yang telah memberikan rasa kekeluargaan yang berharga bagi penulis terimakasih sudah membersamai di waktu suka dan duka selama penulis menjadi mahasiswa.

12. Teman-teman Kelas A Development yang telah membersamai di setiap pelajaran dan tugas selama penulis menjadi mahasiswa.
13. Member Badminton yang telah membuat penulis sehat dan bugar selama menghadapi pola hidup yang tidak teratur dalam kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Teman seperjuangan TA (Agus, Fikri, Yogi dan bang Yang Yang) yang telah menemani dan memberikan pikiran sehingga penulis mendapat inspirasi waktu mengerjakan TA.
15. Teman, Keluarga, dan tetangga di Desa Kayu Tanam dan sekitarnya yang telah membersamai penulis dan menjadi semanggat di saat penulis mengalami kesusahan.
16. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang selama masa-masa sulit dalam perkuliahan, semoga tulisan ini dapat memberikan semanggat penulis untuk berjuang kembali dalam menjalani hidup menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat bagi orang-orang sekitar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat pula dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik serta saran yang bersifat membangun dengan harapan penulisan tugas akhir ini menjadi tulisan yang baik.

Pontianak, 7 Maret 2025

GREGORIUS JONI KURNIAWAN
NIM.B1011201044

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Jenis penelitian kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dan uji statistik menggunakan *software* Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berarti peningkatan kedua variabel tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Sedangkan variabel dana transfer berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Sementara itu penerimaan dari berbagai jenis retribusi daerah, seperti retribusi pasar, pelayanan kesehatan, dan parkir, telah berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer, Kemandirian Keuangan Daerah

This research aims to determine the influence of regional taxes, regional levies and transfer funds on regional financial independence in West Kalimantan. Type of quantitative research. The model used in this research is a panel data regression model and statistical tests using Eviews 12 software. The results of this research show that regional tax and regional levy variables have a positive effect on regional financial independence, which means that increasing these two variables can increase regional financial independence in West Kalimantan. Meanwhile, the transfer fund variable has a negative effect on regional financial independence. Increased tax revenues allow local governments to be more independent in financing development needs and public services without relying too much on central transfers. Meanwhile, receipts from various types of regional levies, such as market levies, health services and parking, have contributed to increasing regional financial independence.

Keywords: *Regional Tax, Regional Levy, Transfer Funds, Regional Financial Independence*

PENGARUH PAJAK DAERAH , RETRIBUSI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI 14 KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

Latar Belakang

Penyelengaraan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan seluruh sumber pendapatannya dngan tujuan terwujudnya pembangunan daerah yang baik. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Potensi dan sumber daya alam di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat telah dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pendapatan utama dari PAD di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Namun pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu membiayai sepenuhnya pembangunan dan keperluan yang lain-lain di setiap daerah sehingga memerlukan dana transfer dari pusat untuk keperluan pembangunan dan lain-lain yang di butuhkan daerah.

Menurut Musgrave dalam teori desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak daerah serta retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah tanpa bergantung secara berlebihan dari pusat (Riana, 2019). Penelitian terdahulu oleh Nabila (2017) menemukan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara retribusi daerah secara simultan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang serupa oleh Novianti & Apriliawati (2023) menemukan pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan Penelitian oleh Amal (2020) menyatakan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kompetensi keuangan daerah mengacu pada kemampuan daerah dalam mengakomodir seluruh biaya pemerintahannya secara mandiri dengan mendayagunakan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan di daerah. Kompetensi keuangan daerah mengacu pada sejauh mana suatu daerah mampu secara mandiri menyelenggarakan dan mengawasi urusan pemerintahan melalui otonomi daerah. Analisis rasio keuangan mencakup evaluasi berbagai metrik, seperti rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas PAD (Karou & Tolosang, 2022).

Pertanyaan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ?
3. Apakah dana transfer berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah
2. Menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah teradap kemandirian keuangan daerah
3. Menguji dan mengalisis pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah

Metode Penelitian

Bentuk kajian ini merupakan deskriptif kuantitatif yang menggambarkan fenomena yang dihasilkan dari pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024. Jenis data yang dimanfaatkan berupa data sekunder yang didapat dari laman resmi DJPK yang menyediakan informasi mengenai data Kemandirian Keuangan daerah, Pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer. Data yang diperoleh berupa *Time Series* dengan jumlah 10 tahun (2014- 2023) dan data *Cross Section* terdiri dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pada kajian ini, komponen-komponen penentu yang melatar belakangi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat dianalisis melalui model regresi linier berganda yang dipadukan dengan pendekatan regresi data panel. Dengan penggunaan program eviews 12. Ketika diterapkan pada data panel, uji stasioneritas dan uji kointegritas sangat membantu dalam memeriksa sifat-sifat data dan hubungan antar variabel dalam kerangka panel. Dan untuk mendapatkan model terbaik dilanjutkan dengan uji chow, dan uji hausman. Dan dilanjutkan dengan uji t, uji f, uji determinasi dan uji hipotesis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian pada first difference menunjukkan ketiga variabel ini memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 5% artinya ketiga variabel ini tidak memiliki akar unit dan data telah stasioner. Dilanjutkan dengan uji kointegrasi untuk memastikan data memiliki hubungan jangka panjang. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Trace Statistik* dan nilai *Vax-Eigen Value* lebih besar dari nilai *Critical Value* dengan nilai probabilitas besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji ini dapat dinyatakan bahwa tidak kointegrasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji chow. Menunjukkan nilai probabilitas cross- section chi-square 0,0000 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 artinya model Fixed Effect merupakan model yang terbaik dibandingkan dengan Common Effect untuk mengestimasikan data panel. Sedangkan hasil uji Hausman nilai probabilitas cross section random 0,0047 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model *Fixed Effect* merupakan model yang terbaik dibandingkan dengan *Random Effect* untuk mengestimasi data panel. Variabel pajak daerah menunjukkan t-statistik 6.824559 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.

Variabel retribusi daerah menunjukkan t-statistik sebesar 0.826067 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4104 yang lebih besar dari ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel dana transfer menunjukkan t-statistik sebesar -1.613487 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1092 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana transfer berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari perhitungan nilai *Adjusted R-Square* pada tabel 4 di ketahui bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer adalah 0.928337 atau 92,83% hal ini menandakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer terhadap kemampuan kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sebesar 92,83% sedangkan sisanya sebesar 7,17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD, yang merupakan indikator utama kemandirian keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

2. Retribusi daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Penerimaan dari berbagai jenis retribusi daerah, seperti retribusi pasar, pelayanan kesehatan, dan parkir, telah berkontribusi dalam meningkatkan PAD di Kalimantan Barat. Retribusi daerah yang efektif memberikan pendapatan yang stabil, memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, retribusi daerah berperan signifikan dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.

3. Dana trasnfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak daerah. Meskipun dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap dana ini dapat berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Beberapa daerah dengan penerimaan DAU, DAK, dan DBH tinggi, seperti Ketapang dan Sanggau, mengalami peningkatan signifikan dalam alokasi dana, namun tidak diikuti dengan peningkatan PAD yang sebanding.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat menunjukkan tren yang bervariasi antar kabupaten/kota, dengan kota besar seperti Pontianak dan Singkawang menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan BPHTB. Namun, beberapa daerah masih menghadapi tantangan seperti fluktuasi penerimaan, ketidakteraturan data, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, diperlukan langkah-langkah strategis seperti optimalisasi penarikan pajak melalui digitalisasi sistem, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan, mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. retribusi pelayanan pasar, kesehatan, parkir, persampahan/kebersihan, pengujian kendaraan bermotor, dan pemakaian kekayaan daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Meskipun beberapa daerah seperti Pontianak dan Singkawang menunjukkan tren peningkatan yang stabil, terutama dalam retribusi pelayanan pasar dan parkir, beberapa kabupaten lainnya masih mengalami fluktuasi atau penurunan penerimaan, seperti pada retribusi pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan asuransi kesehatan seperti BPJS. Secara umum, peningkatan penerimaan retribusi ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih efektif.

3. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori desentralisasi fiskal, teori transfer fiskal, teori ketergantungan dan teori kemandirian keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
1 PENDAHULUAN 2
2 KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Tinjauan Teori 6
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal 6
2.1.2 Teori Ketergantungan Fiskal 7
2.1.3 Teori Transfer Fiskal 7
2.1.4 Teori Kemandirian Keuangan Daerah 7
2.2 Tinjauan Literatur 8
2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap KKD 8
2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap KKD 9
2.2.3 Pengaruh Dana Transfer Terhadap KKD 9
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 10
2.3.1 Kerangka Konseptual 10
2.3.2 Hipotesis Penelitian 10
3. METODE PENELITIAN 10
3.1 Bentuk, Tempat, dan Waktu Penelitian 10
3.2 Jenis dan Sumber Data 10
3.3 Metode dan Analisis 11
3.3.1 Uji Data Panel 11
3.3.2 Uji Model 11
3.3.3 Uji Hipotesis 11
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Hasil Penelitian 13
4.1.1 Uji Stasioner 13
4.1.2 Uji Kointegrasi 14
4.1.3 Uji Model 14
4.1.4 Estimasi Model Regresi Data Panel 16
4.1.5 Uji Hipotesis 16
4.2 Pembahasan 17
4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap KKD 17
4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap KKD 22
4.2.3 Pengaruh Dana Transfer Terhadap KKD 25
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 27
5.1. Kesimpulan 28
5.2. Rekomendasi 28

DAFTAR RUJUKAN 30
LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uji Stasioner 14
Tabel 2. Uji Kointegrasi 15
Tabel 3. Uji Model 15
Tabel 4. Hasil Regresi *Fixed Effect* 16
Tabel 5. Realisasi Pajak Hotel 2014-2023 18
Tabel 6. Realisasi Pajak Restoran 2014-2023 19
Tabel 7. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan 2014-2023 20
Tabel 8. Realisasi Pajak Reklame 2014-2023 21
Tabel 9. Realisasi Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 2014-2023 21
Tabel 10. Realisasi PBBP2 2014-202322 22
Tabel 11. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar 2014-2023 23
Tabel 12. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan 2014-2023 24
Tabel 13. Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan 2014-2023 25
Tabel 14. Realisasi Retribusi Pemankaian Kekayaan Daerah 2014-2023 25
Tabel 15. Realisasi Dana Alokasi Umum 2014-2023 27
Tabel 16. Realisasi Dana Alokasi Khusus 2014-2023 27
Tabel 17. Realisasi Dana Bagi Hasil 2014-2023 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2014-2023 di Kalimantan Barat.....3
Gambar 2. Realisasi Pendapatan Daerah 2014-2023 di Provinsi Kalimantan Barat (Dalam miliaran Rupiah) 4
Gambar 3. Realisasi PAD, Transfer Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014-2023 di Kalimantan Barat (Dalam miliaran Rupiah) 6
Gambar 4. Kerangka Konseptual 10

PENGARUH PAJAK DAERAH , RETRIBUSI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI 14 KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GREGORIUS JONI KURNIAWAN

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of regional taxes, regional levies and transfer funds on regional financial independence in West Kalimantan. Type of quantitative research. The model used in this research is a panel data regression model and statistical tests using Eviews 12 software. The results of this research show that regional tax and regional levy variables have a positive effect on regional financial independence, which means that increasing these two variables can increase regional financial independence in West Kalimantan. Meanwhile, the transfer fund variable has a negative effect on regional financial independence. Increased tax revenues allow local governments to be more independent in financing development needs and public services without relying too much on central transfers. Meanwhile, receipts from various types of regional levies, such as market levies, health services and parking, have contributed to increasing regional financial independence.

Keywords: *Regional Tax, Regional Levy, Transfer Funds, Regional Financial Independence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Jenis penelitian kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dan uji statistik menggunakan *software* Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berarti peningkatan kedua variabel tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat. Sedangkan variabel dana transfer berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Sementara itu penerimaan dari berbagai jenis retribusi daerah, seperti retribusi pasar, pelayanan kesehatan, dan parkir, telah berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer, Kemandirian Keuangan Daerah

b1011201044@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyelengaraan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan seluruh sumber pendapatannya dngan tujuan terwujudnya pembangunan daerah yang baik. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Potensi dan sumber daya alam di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat telah dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pendapatan utama dari PAD di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Namun pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu membiayai sepenuhnya pembangunan dan keperluan yang lain-lain di setiap daerah sehingga memerlukan dana transfer dari pusat untuk keperluan pembangunan dan lain-lain yang di butuhkan daerah.

Menurut Musgrave dalam teori desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak daerah serta retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah tanpa bergantung secara berlebihan dari pusat (Riana, 2019). Penelitian terdahulu oleh Nabila (2017) menemukan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara retribusi daerah secara simultan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang serupa oleh Novianti & Apriliawati (2023) menemukan pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan Penelitian oleh Amal (2020) menyatakan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kompetensi keuangan daerah mengacu pada kemampuan daerah dalam mengakomodir seluruh biaya pemerintahannya secara mandiri dengan mendayagunakan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan di daerah. Kompetensi keuangan daerah mengacu pada sejauh mana suatu daerah mampu secara mandiri menyelenggarakan dan mengawasi urusan pemerintahan melalui otonomi daerah. Analisis rasio keuangan mencakup evaluasi berbagai metrik, seperti rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas PAD (Karou & Tolosang, 2022). Rasio kemandirian keuangan daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Rasio ini ditentukan melalui perbandingan PAD dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pinjaman. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{KKD}=\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}}\times 100\%$$

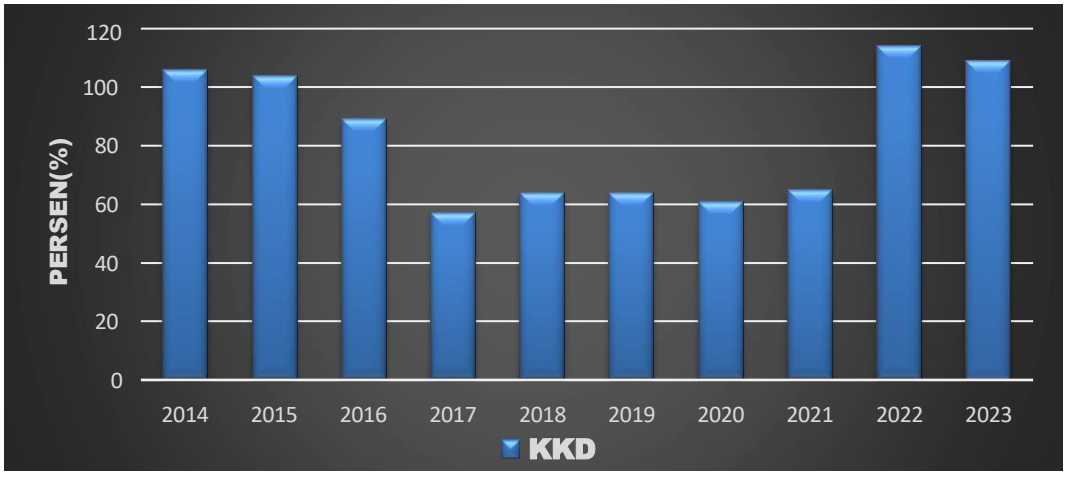
Sumber:(Karou & Tolosang, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 menetapkan pola yang menggambarkan korelasi antara pusat dan daerah untuk mengimbangi keuangan yaitu:

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif
Mandiri	100 >	Instruktif

Sumber: (Sinurak dkk, 2023)

Menurut Hersey dan Blanchard menjelaskan beberapa pola tersebut yaitu instruktif adalah pola dimana pemerintah pusat lebih banyak campur tangan dari pada pemerintah di daerah tersebut. Pola konsultif menunjukkan kurangnya peran pusat. Pola partisipatif menunjukkan ikut serta pemerintahan pusat sedikit karena kemandirian daerah sudah tinggi. Delegatif menunjukkan tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat (Sinurat dkk, 2023).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2014-2023 di Kalimantan Barat.

Rasio kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat terlihat dari awal periode hingga akhir periode ada peningkatan. Pada tahun 2014, 2015, 2022 dan 2023 rasio kemandirian keuangan daerah Kalbar diatas 100%, ini menunjukkan PAD lebih tinggi dari pada dana transfer dari pusat. Kemandirian keuangan daerah merupakan kapasitas Pemerintah daerah dalam mendanai operasi pemerintahan mereka sendiri, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan kepada penduduk melalui pengumpulan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan bagi daerah (Sundjoto dkk, 2023).

Pendapatan daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengakui kenaikan kekayaan bersih selama jangka waktu tertentu. PP No. 12 Tahun 2019 mendefinisikan pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan moneter yang disetorkan ke dalam rekening kas umum daerah, serta penerimaan lainnya yang memenuhi ketentuan hukum dan merupakan penambahan ekuitas daerah dalam satu tahun anggaran. Menurut UU No.23 Tahun 2014, penghasilan daerah bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Dan Keuangan (DJPK)
Gambar 2. Realisasi Pendapatan Daerah 2014-2023 di Provinsi Kalimantan Barat (Dalam miliaran Rupiah).

Pendapatan daerah di Kalimantan Barat cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut menandakan pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi PAD dan transfer dari pemerintah pusat. Kalimantan Barat mempunyai sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, yang selanjutnya berfungsi untuk meningkatkan pembangunan daerah. PAD didapat melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, sumber daya daerah yang terpisahkan, dan PAD lain yang ditetapkan secara hukum. Faktor utama yang berkontribusi bagi PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai UU No.1 Tahun 2022 yakni pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak-pajak ini dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait dan berguna dalam mendanai operasional Pemerintah daerah dan mendorong pembangunan daerah (Megawati dkk, 2023).

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memungut berbagai bentuk pajak yang dituangkan pada UU No. 1 Tahun 2022 yakni: 1. Pajak Kendaraan Bermotor, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Pemanfaatan Air Tanah, 4. Pajak Reklame, 5. Pajak Penerangan Jalan, 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, 8. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, 9.Pajak Sarang Burung Walet, 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 12. Pajak Rokok. 13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 14. Pajak Alat Berat. 15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 16. Opsen Pajak MBLB.

Retribusi daerah merupakan penghasilan yang dipungut oleh Pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu kepada perseorangan atau perusahaan di daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2016) menguraikan aturan yang mengatur penetapan retribusi daerah sebagai berikut:

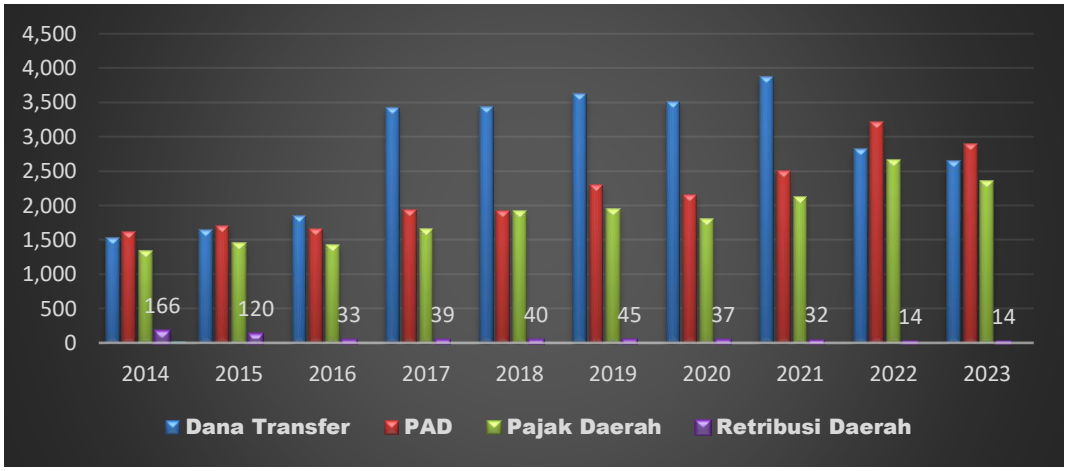
1. Retribusi jasa umum, untuk memastikan penagihannya, perlu diperhatikan berbagai faktor, antara lain biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal terkait penyediaan jasa. Selain itu, untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, dan efektivitas pengaturan layanan dan izin.

2. Retribusi jasa usaha, keuntungan dari jasa usaha diperoleh dengan keberhasilan menjalankan operasional dan menyelaraskannya dengan harga pasar, dengan tujuan mencapai keuntungan finansial yang memuaskan.

3. Retribusi perizinan tertentu, bertujuan untuk mengimbangi sebagian atau keseluruhan biaya yang terkait dengan perolehan izin.

Dana transfer merupakan alokasi APBN dalam melaksanakan desentralisasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah. Adapun komposisi dari dana traansfer diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin tinggi penerimaan transfer menunjukkan tingginya pula pemerintah daerah tersebut dalam bergantung terhadap pemerintah pusat secara finansial (Khoirunnisa & Sofilda, 2023).

Tindakan yang dilakukan Pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD salah satu pendekatannya dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi daerah, memastikan bahwa pendapatan daerah dimaksimalkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti pajak dan retribusi daerah, yang secara tradisional adalah faktor-faktor paling penting bagi penghasilan daerah (Putri, 2021).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Gambar 3. Realisasi PAD, Transfer Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014-2023 di Kalimantan Barat (Dalam miliaran Rupiah).

PAD dan pajak daerah cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, namun berbeda dengan retribusi daerah yang cenderung menurun dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan retribusi daerah tidak berdampak terhadap PAD. Hal ini disebabkan pajak daerah yang meningkat sehingga menjadi pendapatan utama PAD. Dana transfer dari pusat juga cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2016-2021 dana transfer jauh melebihi PAD, hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kalbar masih bergantung dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan di daerah.